

DPRA Minta Presiden Jokowi Pertimbangkan Usulan Pj Gubernur Aceh

Category: Aceh

written by Maulya | 03/07/2023



[Orinews.id](https://orinews.id) | **Banda Aceh** – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat mempertimbangkan usulan mereka terkait calon Penjabat (Pj) Gubernur Aceh. Usulan tersebut adalah Bustami Hamzah, Sekretaris Daerah Aceh, yang dinilai paham dengan kondisi Aceh saat ini.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra, Abdurrahman Achmad, di kantor DPRA, Senin (3/7/2023). Ia mengatakan, Bustami memiliki hubungan baik dengan DPR, pejabat, birokrasi, dan masyarakat Aceh. Ia juga tidak perlu penyesuaian jika ditunjuk sebagai Pj Gubernur Aceh dan bisa langsung bekerja untuk menghadapi agenda politik besar yaitu Pemilu 2024.

“Mudah-mudahan Presiden memperhatikan kondisi dan keinginan rakyat Aceh ini,” ujar Abdurrahman.

Selain Bustami Hamzah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dikabarkan telah mengusulkan dua nama lain kepada Presiden Jokowi, yaitu Safrizal ZA, Dirjen Bina Adwil Kemendagri, dan Achmad Marzuki, Pj Gubernur Aceh saat ini. Namun, kedua nama tersebut merupakan usulan dari Kemendagri sendiri dan tidak melibatkan DPRA.

Abdurrahman menilai, Pj Gubernur Aceh saat ini, Achmad Marzuki, banyak bermasalah dan tidak peka dengan kondisi Aceh. Ia mencontohkan, Achmad Marzuki pernah meminta revisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tanpa berkoordinasi dengan para tokoh ulama terlebih dahulu sehingga terjadi gejolak di masyarakat.

Selain itu, kinerja Achmad Marzuki selama ini dinilai tidak memberikan hal positif untuk Aceh. Ia menyebutkan beberapa janji Pj Gubernur Aceh yang belum terealisasi, seperti perpanjangan dana otonomi khusus (Otsus), dan pembangunan pabrik minyak goreng di Aceh.

“Jadi banyak hal-hal lain yang kita lihat, termasuk laporan dari LKPJ Gubernur masih di bawah target semuanya,” katanya.

Karena itu, kata Abdurrahman, jika Presiden Jokowi tetap menunjuk Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh maka DPRA akan berembuk dan bermusyawarah kembali untuk mengambil langkah-langkah tertentu yang harus dilakukan.

“Tentu itu akan kita laksanakan setelah Perpres itu turun. Dan saya rasa Presiden harus memperhatikan hal ini,” tutupnya.

|Reporter: Khairil Akram

|Editor: Awan